

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LEMBAGA YUDISIAL:
STUDI KASUS IMPLEMENTASI KETERBUKAANNYA DALAM
PEMBAHARUAN MAHKAMAH AGUNG 2010-2014**

Erris Achmad Rizky¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pembaharuan Mahkamah Agung 2010-2014, serta menganalisa sejauh mana implementasi keterbukaan informasi tersebut telah dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Mahkamah Agung sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, masih terjadi permasalahan dalam unit struktur organisasi terkait keterbukaan informasi publik dan ada upaya untuk menutupi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Meskipun Mahkamah Agung telah melaksanakan inisiatif awal untuk membuat aturan dengan diterbitkannya SK KMA 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di pengadilan dan diperbarui dengan adanya SK KMA 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, tetapi dalam pelaksanaannya masih menunjukkan ada hambatan dalam keterbukaan informasi. Permasalahan tersebut terlihat dari ditemukannya penyalahgunaan wewenang terkait pemberian informasi dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Mahkamah Agung adalah lembaga yang mempunyai inisiatif awal dalam keterbukaan informasi publik sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* tersebut sudah dilaksanakan, tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat kendala yang menghambat jalannya keterbukaan informasi publik di lembaga Mahkamah Agung RI.

Kata kunci : Mahkamah Agung, Implementasi Keterbukaan Informasi Publik, *Good Governance*, Struktur Organisasi

¹Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Bakrie

***OPENESS OF PUBLIC INFORMATION IN JUDICIARY : A CASE STUDY
IMPLEMENTATION OF OPENESS 2010 – 2014 RENEWAL OF THE
SUPREME COURT***

by Erris Achmad Rizky²

ABSTRACT

This research aims to look at the implementation of the public information openness in the renewal of the Supreme Court's 2010-2014, and analyze the extent to which implementation of the openness has been implemented. This study used a qualitative approach to the types of descriptive research. The results of this study explained that the implementation of the public information openness in the Supreme Court was implemented but not yet at the maximum. Note This is still happening in the research problems in the unit organization structure related information openness of public and there have been attempts to cover the information needed by the public. Although the Supreme Court has been carrying out an early initiative to create rules with SK KMA 144 in 2007 about information openness in court and re new with the KMA SK 1-144 in 2011 about the guidelines of the Ministry of information in the courts but in the execution shows there are still barriers in information openness. These problems visible from found abuse related information and granting authority misused for personal gain. The Supreme Court is an institution which has the initiative early in the openness of public information as one of the efforts to bring about good governance has been conducted, but at the implementation there are still obstacles hindering his net public information openness in the Supreme Court.

Keyword : Supreme Court, Implementation of Public Information Openness, Good Governance, Structur of Organization.

²Student of Political Science, Bakrie University.